



Judul : Apa Kabar Penyelidikan Dugaan Permainan Mafia Minyak Goreng
Tanggal : Minggu, 03 April 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Apa Kabar Penyelidikan Dugaan Permainan Mafia Minyak Goreng

Langkanya minyak goreng (migor) di berbagai wilayah beberapa waktu lalu, diduga karena ada permainan mafia atau kartel.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku punya data tentang dugaan kartel minyak goreng.

Data itu sudah dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). "Melalui email pengaduan ke KPPU, kami sampaikan data

untuk memperkuat penyelidikan KPPU mengenai dugaan kartel yang membuat langka dan mahalnya minyak goreng tiga bulan terakhir," kata Boyamin, Jumat (1/4).

Sebelumnya, KPPU juga pernah menyampaikan informasi tentang dugaan kartel perdagangan *crude palm oil* (CPO) dan minyak goreng yang menyebabkan langka dan mahalnya salah satu kebutuhan pokok ini.

Saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR

itu, KPPU juga menyatakan telah melakukan penyelidikan berdasar satu bukti mengenai dugaan kartel ini.

Jika KPPU menyampaikan 8 perusahaan. MAKI melaporkan 9 perusahaan besar eksportir CPO ke luar negeri secara besar-besaran melalui fasilitas pusat logistik berikat di Pulau Sumatera. Namun, 9 perusahaan itu diduga tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen.

Menurut Boyamin, ada satu perusahaan asing yang diduga menjadi pembeli CPO dari 9 perusahaan besar itu, dengan transaksi Rp 1,1 triliun. "Pembeli itu perusahaan berbasis di negara tetangga Asia Tenggara," tandasnya.

Yang menjadi pertanyaan, apakah buktinya? Jika terbukti, apa saja sanksinya? Berikut wawancara dengan Ketua KPPU Ukay Karyadi dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengenai hal ini.

DPR - RI

UKAY KARYADI

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Mafia Migor Pasti Bukan Ecek-ecek

Anda menyebut ada indikasi kartel minyak goreng. Mana buktinya?

Mengenai bukti, nanti ya. Kalau diungkap ke publik sekarang, kami khawatir mengalami kesulitan dalam mencari alat bukti dan melakukan penyelidikan.

Kenapa mengalami kesulitan?

Nanti mereka yang diduga sebagai kartel, siap-siap, menghilangkan alat bukti. Makanya, mereka jangan sampai tahu apa yang sudah dilakukan KPPU.

Oh, itu alasan KPPU belum mau menyebutkan perusahaan yang diduga sebagai kartel...

Iya, makanya kami belum mau menyebutkan nama-namanya. Kalau terlalu terbuka, akan menyusahkan tim investigasi dalam mencari alat bukti yang lain. Karena, yang kita hadapi ini bukan pelaku usaha sembarangan.

Apakah mereka pemain besar?

Mereka bisa melakukan ini di seluruh Nusantara. Berarti, mereka bukan pemain kecil.

Menurut Anda, ada 8 korporasi yang diduga sebagai kartel. Apakah ada penambahan?

Delapan perusahaan itu berdasarkan pra penyelidikan awal. Bisa didalami

ke tahap berikutnya. Tidak menutup kemungkinan, dalam proses penyelidikan berikutnya, berubah.

Maksud Anda bertambah?

Bisa saja bertambah, karena di beberapa wilayah itu ada kasus-kasus tersendiri. Misalnya, penjualan bersyarat. Ada yang beli minyak goreng, tapi harus membeli terigu juga. Masing-masing wilayah berbeda. Itu bisa jadi berbeda pula perusahaannya.

Seperti apa 8 perusahaan ini?

Delapan perusahaan ini, adalah kelompok usaha. Mereka bukan hanya memiliki satu perusahaan. Tapi, memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bisnis minyak goreng.

Jika terbukti, bakal kena pasal berapa?

Kalau tidak salah, itu Pasal 5 tentang penetapan harga. Lalu, Pasal 11 tentang kartel. Kemudian, Pasal 19 tentang pembatasan penjualan. ■ REN

MARTIN MANURUNG

Wakil Ketua Komisi VI DPR

KPPU Perlu Lebih Tegas Dan Cepat

KPPU mengungkapkan ada indikasi kartel minyak goreng. Bagaimana tanggapan Anda?

Sebagai wakil rakyat, saya mendukung KPPU untuk menuntaskan dugaan adanya kartel minyak goreng.

Apa saran Anda?

Saya mendorong KPPU lebih tegas dan cepat dalam menjalankan fungsi-fungsinya, terutama soal kartel minyak goreng.

Apakah Anda sudah mengetahui bukti-bukti mengenai kartel itu?

Katanya, KPPU masih mengumpulkan bukti-bukti sampai 60 hari ke depan. Nah, itu yang mau kami desak agar mereka mensekresikan bukti tersebut.

Kenapa mendesak?

Karena, mereka sudah mengumumkan adanya kartel minyak goreng di media. Ya, kami minta buktikan.

Bukti itu sangat penting ya...

Iya, sekaligus untuk melengkapi dugaan permainan mafia minyak goreng yang diungkapkan Pemerintah (Kementerian Perdagangan).

Pengusutan ini harus sampai tuntas ya...

Kita menunggu, apa saja temuan KPPU. Jika bukti sudah lengkap, maka bisa masuk penuntutan dan persidangan.

Apa harapan Anda mengenai persoalan ini?

Saya berharap, pengusutan tentang dugaan kartel minyak goreng ini, membuat dunia usaha, khususnya minyak goreng bisa membaik.

Sehingga, minyak goreng tidak langka dan harganya terjangkau masyarakat.

Jika sampai tuntas, hasil pengusutan ini baik untuk menyehatkan persaingan usaha ya?

Persaingan usaha, memang seharusnya semakin baik di komoditas minyak goreng. Supaya, tata kelola dan distribusi minyak goreng lebih bagus. ■ REN